



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
AUDIENSI WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
ALIANSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SELURUH INDONESIA (BEM SI)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Pertemuan/Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka (Virtual)
Hari/Tanggal	: Rabu, 1 September 2021
Waktu	: 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: R. Rapat Pimpinan DPR RI Gd. Nusantara III Lantai 4
Acara	: Audiensi mengenai Uang Kuliah Tunggal Tak Terjangkau, Mahasiswa Menggugat
Ketua	: Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
Sekretaris Rapat	: Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir	: 1. Pimpinan dan Anggota Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI) 2. Delegasi BEM SI 1. Ketua Aliansi BEM 2. BEM dan Senat Mahasiswa 3. Mahasiswa Umum 3. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra 4. Staff

I. PENDAHULUAN

Pertemuan audiensi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan **Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)** dilakukan secara virtual. Audiensi dimulai Pukul 14.00 WIB dan dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra. Dalam dialog ini hadir Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Wahyu Suryono Pratama, dan Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia. Selain itu dialog yang dilakukan secara virtual tersebut diikuti perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus di Indonesia.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai leading sektor tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga PPKM Level 4 yang kini masih terus diperpanjang. Pada satu sisi kebijakan PPKM level 4 yang dikeluarkan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk mencegah penyebaran covid-19. Namun di sisi lain, PPKM Level 4 juga akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat seluruh sektor kehidupan sedang mengalami masalah yang cukup serius. Adapun sektor yang berdampak langsung akibat pandemi Covid-19 yakni tentang kesejahteraan sosial yang diantaranya sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Dalam sektor pendidikan sendiri pemerintah telah banyak mengambil inisiatif kebijakan sebagai jalan keluar dari persoalan pendidikan ditengah situasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diantaranya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Inisiatif pemerintah dalam merespon permasalahan di sector pendidikan dapat tercermin pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya keterlibatan perguruan tinggi dalam pencegahan penularan Covid-19 ini di dalam lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang mengamanatkan Perguruan Tinggi wajib menerapkan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, sejumlah kebijakan tersebut dianggap kurang efektif karena tidak semua perguruan tinggi menjalankan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Artinya, inisiatif pemerintah dalam merespon masalah pendidikan masih terkendala dalam proses implementasinya. Dari penjelasan di atas, pemerintah dalam hal ini Kementrian pendidikan dan kebudayaan dipandang kurang maksimal dalam mendapatkan penyesuaian kebijakan yang relevan dengan pandemi Covid-19. Hal ini nampak dari pembiayaan UKT yang mahal dan kurikulum pembelajaran yang tidak relevan dengan metode daring. Oleh karena itu, kami mengharapkan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga membidangi masalah pendidikan untuk mencari jalan keluar sekaligus membantu mahasiswa yang mengalami kebuntuan dalam pembayaran UKT/SPP. Menyikapi hal itu, kami segenap aliansi BEM, BEM Universitas dan seluruh mahasiswa mengundang Bapak terlibat dalam kegiatan webinar dengan mengusung tema "Ruang Dialog Mahasiswa (UKT Tak Terjangkau, Mahasiswa Menggugat)".

Maksud dan Tujuan Kegiatan yakni Mengkonsolidasikan keberpihakan DPR RI terhadap problem biaya pendidikan mahasiswa di tengah situasi pandemi Covid-19 dan Mendorong kebijakan UKT sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendikbud.

Tanggapan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak substantif sebaiknya dihentikan sementara.

Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. Kami meminta Komisi X DPR RI untuk menyisir anggaran Pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan Pendidikan di masa pandemi.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasikan melalui Komisi X DPR RI agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa tersebut. Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan karena mereka harus menjadi pemimpin ide.

Kedepan, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra berpesan agar konsep kuliah *online* terus dimatangkan. Menurutnya di masa depan kuliah *online* khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan. Kuliah *online* harus terus diperbaiki karena kedepannya diprediksi menjadi model Pendidikan ke depan.

Tanggapan Ketua komisi X DPR RI:

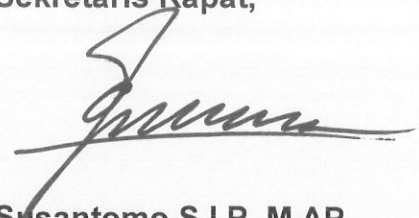
Ketua Komisi X DPR RI mengatakan sepakat dengan pandangan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra untuk menajamkan penggunaan alokasi 20% dana pendidikan APBN untuk fungsi pendidikan. Menurutnya saat ini sebagian besar alokasi dana pendidikan diwujudkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang belum tentu penggunaannya untuk fungsi pendidikan. Isu-isu besar yang diamanatkan oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra seperti refocusing ulang anggaran Pendidikan 20% APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20% dana Pendidikan hanya 85 Triliun dikelola kemendikbud dan 55 Triliun dikelola kemenag. Sisanya 370 Triliun jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya.

Saat ini Komisi X DPR RI berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh atau minimal 50% dari total anggaran fungsi pendidikan bisa dikelola oleh Kemendikbud/Kemenag. Solusi yang ditawarkan adalah '*Money Follow Student*' sehingga indeks biaya pemerintah diberikan langsung (direct) kepada mahasiswa dengan tujuan meminimalisir fragmentasi atau diskriminasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kami berharap konsep *money follow student* ini bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dimatangkan di Komisi X.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 15.30 WIB

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.